

LAPORAN TINDAK LANJUT
3 UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I TAHUN 2025



TRIWULAN I TAHUN 2025

**TINDAK LANJUT TERHADAP MONITORING DAN EVALUASI
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

A. Latar Belakang

Berdasar aplikasi SIUPER Badilum yaitu Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA terhadap 142 responden, memperoleh nilai hasil Survey 4,00 / 100,00% hasil ini masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan rumusan dari 5 ruang lingkup/unsur yang memiliki indeks sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Nilai Per RL	Kategori	Peringkat
1.	DISKRIMINASI PELAYANAN	4,000	Sangat Baik	3
2.	PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	4,000	Sangat Baik	4
3.	PENERIMAAN IMBALAN/SUAP	4,000	Sangat Baik	5
4.	PUNGUTAN LIAR	4,000	Sangat Baik	1
5.	PRAKTIK PERCALOAN	4,000	Sangat Baik	2

Dari ruang lingkup – ruang lingkup diatas terdapat 3 (tiga) ruang lingkup terendah dan perlu untuk ditindak lanjuti, yaitu :

1. Diskriminasi Pelaynan.
2. Pelayanan Diluar Prosedur.
3. Penerimaan Imbalan/Suap.

B. Tindak Lanjut Terhadap 3 (tiga) Unsur Terendah

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah hasil Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA masih masuk dalam kategori sangat baik atau dalam nilai A. Namun perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah tersebut dengan cara :

1. Diskriminasi Pelayanan.

Dari hasil survey yang yang diambil dari aplikasi SiSuper di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA diperoleh data seperti tabel berikut ini :

DISKRIMINASI PELAYANAN (U1)	
Jumlah	632
NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)	3,994
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))	0,499

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari diskriminasi pelayanan karena mempunyai nilai NRR Per RL : 3,994.

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai pada variabel tindakan diskriminasi antara lain:

- Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyediakan mesin antrean dan telah menerapkannya dengan baik, sehingga urutan pemberian pelayanan akan berdasarkan pada nomor antrean.
- Adanya layanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan orang yang telah berusia lanjut.

Dalam hal ini semua pengguna layanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menyatakan tidak ada diskriminasi pelayanan.

Untuk mempertahankan nilai tersebut segenap Pimpinan dan jajarannya selalu menekankan melalui apel pagi petugas PTSP agar melayani pengguna layanan dengan baik dan dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

2. Pelayanan Diluar Prosedur

Unsur Pelayanan Diluar Prosedur memiliki nilai Per RL 4,00 seperti hasil survey SiSuper seperti tabel berikut ini :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,8000

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semua pengguna layanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA menyatakan bahwa pelayanan telah sesuai prosedur.

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan variable Pelayanan diluar prosedur antara lain :

- Adanya HAWASBID PTSP yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mememantau kegiatan yang ada di PTSP.
- Adanya CCTV yang dapat memantau kegiatan Petugas PTSP
- Selalu adanya apel pagi bagi petugas PTSP yang dipimpin oleh jajaran Pimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu menekankan agar bekerja secara professional dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk mempertahankan hal tersebut dalam setiap kesempatan pertemuan rutin ditekankan kepada khususnya petugas layanan agar melayani pengguna layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan selalu merapkan SMAP (Sistim Manajemen Anti Penyipuan)

3. Penerimaan Imbalan/Suap

Unsur penerimaan imbalan/suap juga mempunyai nilai Per RL 4,00 hal ini di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA seperti tabel dari hasil survey SiSuper berikut ini :

PENERAPAN IMBALAN/SUSP	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,8000

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari pemberian imbalan/suap.

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan variable Penerimaan hadiah antara lain :

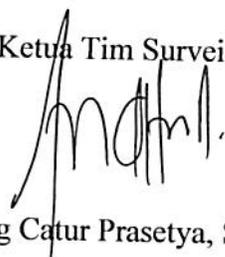
- Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri yogyakarta untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun dengan cara pemasangan panflet dan di website Pengadilan Ngeri Yogyakarta.

Untuk mempertahankan hal tersebut dalam setiap kesempatan pertemuan rutin ditekankan kepada khususnya petugas layanan agar melayani pengguna layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan selalu merapkan SMAP (Sistim Manajemen Anti Penyipuan)

Demikian tindak lanjut atas 3 (tiga) unsur terendah dari laopran survey Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

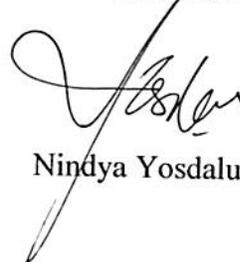
Yogyakarta, 19 April 2025

Ketua Tim Survei



Andang Catur Prasetya, S.H, MH

Sekretaris



Nindya Yosdalu Putra